

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembangunan Pertanian**

Pembangunan secara geografi tidak dapat dilepaskan dari ruang permukaan bumi yang menjadi tempat berpijak. Oleh karena itu, tidak dapat dilepaskan dari tanah baik sebagai sumber daya maupun sebagai lahan tempat pertumbuhan dan pembangunan berlangsung. Tanah sebagai sumber daya, dapat menyediakan kesuburan tanah, bahan bangunan, bahan dasar industri termasuk penyediaan energi. Tanah sebagai lahan, memberikan tempat bagi prasarana dan sarana pembangunan. Baik tanah sebagai sumber daya maupun sebagai lahan dipengaruhi oleh lokasi. Lokasi merupakan sumber daya abstrak yang memiliki nilai ekonomis dan strategi. Lokasi tanah atau lahan yang baik memberikan dasar pesatnya pertumbuhan dan pembangunan. Salim, Emil (1980, hlm. 215) mengatakan bahwa:

Menjelang tahun 2000 maka tanah menjadi faktor pembatas yang semakin menonjol dalam pembangunan. Tanah bisa dipakai untuk berbagai kepentingan yang saling bersaing, seperti keperluan pertanian, lokasi industri, tempat pemukiman, jaringan jalan, saluran irigasi dan air minum, yang bisa memberi manfaat kepada manusia.

Menurut Nurmala, dkk. (2012, hlm. 1) Pertanian merupakan kebudayaan yang pertama kali dikembangkan manusia sebagai respons terhadap tantangan kelangsungan hidup yang berangsur menjadi sukar karena semakin menipisnya sumber pangan di alam bebas akibat laju pertumbuhan manusia. Sedangkan menurut Mubyarto (1989, hlm. 16) pertanian dalam arti luas mencakup: Pertanian dalam arti luas mencakup pertanian rakyat atau pertanian dalam arti sempit disebut perkebunan (termasuk didalamnya perkebunan rakyat dan perkebunan besar), kehutanan, peternakan, dan perikanan (dalam perikanan dikenal pembagian lebih lanjut yaitu perikanan darat dan perikanan laut).

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pertanian adalah aktivitas pemanfaatan sumber daya alam baik hayati ataupun hewani yang

Kanah, 2014

*TINGKAT KESEJAHTERAAN BURUH SADAP KARET PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII WANGUNREJA DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bisa menghasilkan dan dapat di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia.

Indonesia merupakan negara agraris, seperti yang dijelaskan oleh Mubyarto (1989, hlm. 12) bahwa Indonesia masih merupakan negara pertanian, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal itu dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Pertanian Indonesia adalah pertanian tropika, karena sebagian besar daerahnya berada di daerah tropik yang langsung dipengaruhi oleh garis katulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua. Di samping pengaruh katulistiwa, ada dua faktor alam lain yang ikut memberi corak pertanian Indonesia. Pertama, bentuknya sebagai kepulauan dan kedua topografinya yang bergunung-gunung. Pertanian Indonesia dibagi menjadi dua yaitu usahatani pertanian rakyat (*small holder*) dan perusahaan pertanian. Perusahaan pertanian sebagai lawan pertanian rakyat adalah perusahaan pertanian untuk memproduksi hasil tertentu dengan sistem pertanian seragam di bawah manajemen yang terpusat dengan menggunakan berbagai metode ilmiah dan teknik pengolahan yang efisien. Pentingnya sektor pertanian sebagai motor penggerak pembangunan atau pertumbuhan ekonomi pertama kali diusulkan oleh Irma Adelman yang terutama lewat keterkaitan pendapatan atau konsumsi. Pandangan strategis ini didasarkan pada asumsi bahwa pasar lokal akan berkembang apabila pendapatan masyarakat setempat meningkat, dan faktor terakhir ini bisa terjadi apabila ada peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Akan tetapi, Adelman berpendapat bahwa fokus lebih baik diberikan kepada perkembangan pertanian skala kecil dan menengah, karena ini lebih cocok bagi daerah yang pembangunannya masih terbelakang.

Sektor pertanian mendapat prioritas utama karena sektor ini ditinjau dari berbagai segi memang merupakan sektor yang dominan dalam ekonomi nasional. Misalnya kontribusinya dalam pendapatan nasional, perannya dalam dalam pemberian lapangan kerja pada penduduk yang bertambah dengan cepat, kontribusinya dalam penghasilan devisa dan lain-lain. Penelitian yang lebih

mendalam atas proyek-proyek dan program-program repelita akan mengungkapkan dengan jelas bahwa pembangunan pertanian tidak dapat berdiri sendiri. Pertanian mempunyai hubungan erat dan kait mengkait dengan sektor-sektor perekonomian lainnya misalnya sektor perdagangan, pendidikan dan sebagainya. Untuk mempercepat proses pembangunan pertanian terbukti diperlukan peningkatan kegiatan yang simultan dalam hampir semua sektor yang ada. Departemen dalam negeri, perhubungan, penerangan, tenaga kerja, transmigrasi dan koperasi, bahkan departemen sosial dan agama ikut mengambil bagian yang aktif dalam usaha-usaha pembangunan inti dari departemen pertanian.

Sektor pertanian tidak dipandang sebagai sektor yang pasif yang mengikuti sektor industri, tetapi sebaliknya. Pembangunan pertanian didorong dari segi penawaran dan dari segi fungsi produksi melalui penelitian-penelitian, pengembangan teknologi pertanian yang terus menerus, pembangunan prasarana sosial dan ekonomi pedesaan dan investasi-investasi oleh negara dalam jumlah besar. Pertanian kini dianggap sebagai sektor pemimpin (*leading sektor*) yang diharapkan mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya.

Pembangunan pertanian diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Pengertian maju, efisien dan tangguh dalam ekonomi pertanian menurut Mubyarto (1989, hlm. 284) mencakup konsep-konsep mikro dan makro yaitu bagi sektor pertanian sendiri maupun dalam hubungannya dengan sektor-sektor lain diluar pertanian, misalnya industri, transportasi, perdagangan dan keuangan/ perkreditan. Selanjutnya pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor.

Menurut Saragih (dalam Asriani, 2003, hlm. 148) dalam upaya perwujudan konsep pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia, diperkirakan akan terwujud melalui pendekatan strategi pembangunan agribisnis nasional

1. pembangunan agroindustri sebagai motor penggerak agribisnis. Di masa lalu, ketika orientasi pembangunan pertanian terletak pada peningkatan produksi, yang menjadi motor penggerak sektor agribisnis adalah usahatani. Dewasa ini dan di masa yang akan datang, orientasi sektor telah berubah kepada orientasi pasar, dengan berlangsungnya perubahan preferensi konsumen yang semakin menuntut atribut produk yang lebih rinci dan lengkap, maka motor penggerak sektor agribisnis harus berubah dari usahatani kepada industri pengolahan (agroindustri).
2. Pengembangan strategi pemasaran. Pembangunan sektor agribisnis yang berorientasi pasar menyebabkan strategi pemasaran menjadi sangat penting, bahkan paling menentukan keberhasilan. Pengembangan strategi pemasaran ini semakin penting peranannya terutama menghadapi masa depan, dimana preferensi konsumen terus mengalami perubahan
3. Pengembangan sumberdaya agribisnis. Agar sektor agribisnis mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, diperlukan pengembangan sumberdaya agribisnis, khususnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi, serta pembangunan kemampuan sumber daya manusia agribisnis sebagai actor pengembangan sektor agribisnis.
4. Penataan dan pengembangan struktur agribisnis. Struktur agribisnis nasional yang terkotak-kotak telah menciptakan transmisi dan margin ganda, yang secara keseluruhan akan merugikan perkembangan sektor agribisnis nasional. Oleh sebab itu, penataan dan pengembangan sektor agribisnis perlu memperoleh perhatian yang serius. Penataan dan pengembangan struktur agribisnis nasional diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu (1) mengembangkan struktur agribisnis yang terintegrasi secara vertikal mengikuti satu aliran produk (produk line) sehingga subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis pertanian primer dan subsistem agribisnis hilir berada dalam suatu keputusan manajemen; (2) mengembangkan organisasi bisnis (ekonomi) petani agar dapat merebut nilai tambah yang ada pada subsistem agribisnis hulu dan subsistem agribisnis hilir.
5. Pengembangan pusat pertumbuhan agribisnis. Selama ini, lokasi perkembangan agroindustri nasional umumnya berorientasi pada konsentrasi konsumen seperti sektor perkotaan dan di pulau jawa yang merupakan pusat-pusat konsumen. Di masa yang akan datang, orientasi lokasi agroindustri tersebut telah diubah. Dari orientasi pusat-pusat konsumen ke orientasi sentra produksi bahan baku.
6. Pengembangan infrastruktur agribisnis. Untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sektor agribisnis tersebut, diperlukan pengembangan infrastruktur agribisnis, seperti jaringan jalan dan transportasi (laut, udara, sungai dan darat) jaringan listrik, air, pelabuhan perikanan dan peternakan, pelabuhan ekspor dan lain-lain.

Tujuan dasar pembangunan pedesaan di negara-negara sedang berkembang adalah mengurangi atau menghilangkan kemiskinan. Masalah

kemiskinan ini cukup pelik, sehingga berbagai usaha untuk menghilangkannya perlu dilaksanakan secara rapi dan terpadu mencakup upaya-upaya:

- 1) Meningkatkan dan memperluas produksi pertanian
- 2) Meningkatkan kesempatan kerjabaik di dalam maupun di luar sektor pertanian
- 3) Mengurangi kemiskinan terutama yang mengakibatkan kekurangan gizi, dan
- 4) Menciptakan lingkungan yang baik untuk memperlambat pertumbuhan penduduk

Strategi untuk pembangunan pedesaan dalam garis besarnya menurut Mubyarto (1989, hlm. 284) adalah sebagai berikut: pertama, pembangunan pertanian didasarkan pada orientasi peningkatan kesempatan kerja. Kedua, meningkatkan dan membina lembaga pelayanan sosial khususnya pendidikan dan kesehatan, dan ketiga, memperkuat serta membina prasarana kelembagaan keahlian manajemen bagi penduduk desa.

## **B. Usaha Perkebunan Di Indonesia**

Sub sektor pertanian di Indonesia cukup beragam seperti yang dijelaskan oleh Soetrisno (2002, hlm. 12) “pertanian Indonesia tidak hanya terdiri atas sub-sektor pertanian dan subsektor pangan, tetapi juga, sub-sektor peternakan, dan sub-sektor perkebunan”. Sub-sektor perkebunan merupakan sub-sektor pertanian yang secara tradisional merupakan salah satu penghasil devisa negara. Hasil-hasil perkebunan yang selama ini telah menjadi komoditas ekspor antara lain: karet, kelapa sawit, teh, kopi, dan tembakau. Sebagian besar tanaman perkebunan tersebut merupakan usaha perkebunan rakyat, sedangkan sisanya diusahakan oleh perkebunan besar, baik milik pemerintah maupun swasta.

Menurut Banoewidjojo (1983, hlm. 20) “di Indonesia pengertian pertanian dalam arti kata luas dititik beratkan terutama pada produksi yang dihasilkan seperti bila produksi utamanya kayu menjadi kehutanan, bila produksinya ikan akan menjadi perikanan, bila produk utamanya ternak menjadi peternakan, bila produksi utamanya tanaman industri menjadi perkebunan dan khusus buat pertanian rakyat, maka titik berat ditekankan pada usaha tani rakyat di pedesaan”. Oleh karena rakyat di pedesaan mempunyai beraneka ragam usaha, bukan saja mengusahakan tanaman untuk pangan, akan tetapi juga lain-lain jenis produksi

seperti ikan, ternak, tanaman industri dan kayu-kayuan. Maka kegiatan sehari-harinya akan menyangkut juga kelima sektor pertanian. Oleh karena itu muncullah kemudian istilah-istilah seperti perkebunan rakyat, karet rakyat, kopi rakyat, hutan penduduk/rakyat dan sebagainya. Dengan cara penggolongan pertanian dalam arti kata luas ke dalam lima sektornya atas dasar jenis-jenis produksi yang dihasilkan, maka cara pengusahaannya sudah barang tentu berbeda-beda, tergantung .dari kemampuan yang mengusahakan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah.

Kartodirjo dan Suryo (1991, hlm. 4) menjelaskan bahwa “perkebunan merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian komersial dan kapitalistik, diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian dalam skala besar dan kompleks, bersifat padat modal, penggunaan areal pertanahan luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja secara rinci, penggunaan tenaga kerja upahan, struktur hubungan kerja yang rapi dan poenggunaan teknologi modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman komersial yang ditujukan untuk komoditi ekspor di pasaran dunia”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan menjelaskan bahwa perkebunan adalah “segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat”. Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
2. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
3. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkebunan merupakan kegiatan usaha dalam bidang pertanian dalam skala besar yang

mengusahakan tanaman tetentu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.



Di Indonesia perusahaan-perusahaan pertanian yang penting dan yang sudah mempunyai sejarah yang lama adalah perkebunan (*plantation*), yang mengusahakan tanah-tanah yang luas berdasarkan hak-hak perusahaan tertentu. Keseluruhan tanah dan bangunan pabrik serta perumahan-perumahan pegawai, buruh dan pimpinan perkebunan pada satu tempat tertentu disebut *estate*. Menurut Mubyarto (1989, hlm. 21) “Perkebunan atau *plantation*, tidak hanya dikenal di Indonesia tetapi di banyak negara lain. Namun begitu pada umumnya perkebunan ini didapatkan di daerah-daerah bermusim panas di dekat katulistiwa dan karena menggunakan sistem manajemen seperti pada perusahaan industri dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian dari teknologi terbaru maka sering pula disebut “industri perkebunan” atau industri perkebunan”. Sejarah perkebunan asing di Indonesia dimulai pada tahun 1970 dengan pengundangan Hukum agraria oleh pemerintah Kolonial Belanda dan negeri-negeri Eropa Barat lainnya menanam modalnya di Indonesia. Hak-hak usaha yang diperoleh para penanam modal tersebut terkenal dengan nama hak-hak *erfpacht* yang meliputi jangka waktu maksimum 75 tahun dengan luas maksimum 360 hektar (900 *acres*). Hak-hak lain yang dapat diberikan kepada orang-orang asing adalah hak *opstaal* untuk mendirikan bangunan-bangunan pabrik untuk usaha dan hak *eigendom* terutama untuk rumah-rumah tempat tinggal. Walaupun perkebunan asing mulai berkembang pesat di Indonesia sesudah tahun 1870, tanaman-tanaman perkebunan sebenarnya sudah ditanam oleh rakyat di dalam sistem tanam paksa yang dimulai di Jawa sesudah selesai perang Dipenogoro pada tahun 1830.

Pelaksanaan sistem perkebunan menurut Sadjad (1995, hlm. 14) dimulai dengan pembukaan penanaman modal dan teknologi dari luar, pemanfaatan tanah dan tenaga kerja di daerah jajahan. Dari berbagai artikel yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial banyak perusahaan yang mengelola hasil-hasil perkebunan. Salah satunya adalah yang dikembangkan di pulau Jawa, karena selain tanahnya subur dan cocok untuk tanaman perkebunan, di Jawa juga tersedia tenaga kerja yang banyak dan murah. Tanaman perkebunan untuk agro-bisnis yang memproses bahan industri misalnya: karet, tembakau, cengkeh, kapas dan rosela dan serai

wangi. Adapun yang menghasilkan bahan makanan untuk bahan industri makanan misalnya, ialah kelapa, kelapa sawit dan coklat. Bahan makanan yang langsung kita makan misalnya: gula dari tebu, teh, kopi dan kayu manis. Pembangunan agro-industri hendaknya dapat menyerap tenaga kerja, karena itu perkebunan tersebut dibangun di tempat-tempat yang padat penduduknya, misalnya di Pulau Jawa. Sebaliknya, perkebunan memerlukan lahan yang luas, lebih tepat diusahakan di pulau-pulau yang belum padat penduduknya.

Usaha perkebunan di Indonesia cukup beragam, seperti yang di jelaskan Kartodirjo dan Suryo (1991, hlm. 135) Berdasarkan tanaman yang diusahakan (ditanam), perkebunan dapat dibedakan menjadi:

1. Perkebunan tebu
2. Perkebunan kopi
3. Perkebunan teh
4. Perkebunan coklat
5. Perkebunan rempah-rempah, seperti: perkebunan pala, perkebunan lada, dan lain-lain
6. Perkebunan karet
7. Perkebunan kelapa sawit
8. Perkebunan kina
9. Perkebunan tembakau, dan
10. Perkebunan kapas

Jenis perkebunan di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian. Semangun (1989, hlm. 2) mengklasifikasikan jenis perkebunan berdasarkan pengelolaannya, terdiri atas 3 bagian yaitu :

1. Perkebunan Negara  
Yaitu perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh negara.
2. Perkebunan Swasta  
Yaitu perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh pihak swasta nasional atau asing.
3. Perkebunan Rakyat  
Yaitu usaha tanaman perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan perseorangan yang tidak berakte notaris/ tidak berbadan hukum

Hasil-hasil pembangunan sub-sektor perkebunan yang telah dicapai hingga saat ini adalah pencerminan dari kebijaksanaan, strategi serta langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah/Direktorat Jenderal Perkebunan. Menurut Departemen Pertanian (1978, hlm. 128) keberhasilan pembangunan sub-sektor perkebunan banyak pula dibatasi oleh berbagai faktor, apabila dihubungkan dengan usaha pemasaran produk-produk perkebunan di pasaran internasional. Diantaranya, adalah guncangan-guncangan harga, hambatan perdagangan berupa “tariff dan non-tariff”, pergeseran-pergeseran dalam luas pasaran internasional sebagai akibat dari naik turunnya produksi negara konsumen, persaingan antar negara produsen hasil perkebunan dan lain-lain. Guncangan-guncangan pemasaran yang demikian itu tentu membawa akibat yang luas dan kompleks, diantaranya adalah akibat pada usaha peningkatan produksi, dan yang pada akhirnya berakibat pula pada tingkat pendapatan yang diterima petani pekebun serta usaha swasta dan negara di bidang perkebunan. Dalam bidang usaha peningkatan produksi perkebunan, masalahnya antara lain menyangkut modernisasi usaha rakyat, diversifikasi, peremajaan, efisiensi perusahaan, penekanan ongkos produksi, dan lain-lain. Meskipun banyak hambatan yang dijumpai, prospek pembangunan perkebunan tidaklah begitu suram dimasa depan mengingat kemajuan-kemajuan yang banyak dicapai dalam pengembangan industri dalam negeri terutama yang mengolah hasil-hasil perkebunan, kemajuan-kemajuan industri di negara konsumen, usaha-usaha yang terus dirintis dalam bidang kerjasama antara negara produsen hasil perkebunan untuk menjamin peningkatan pemasaran internasional.

Usaha-usaha yang telah dirintis/dilaksanakan dalam pelita II Menurut Departemen Pertanian (1978, hlm. 128) masih perlu ditingkatkan, diantaranya yang menyangkut usaha-usaha terpadu melalui sistim unit manajemen proyek dan sistim perkebunan inti (NES) untuk lebih memodernisir usahatani perkebunan rakyat dalam rangka meningkatkan pendapatannya. Bagi perkebunan besar masih diperlukan adanya peningkatan efisiensi manajemen perusahaan, peningkatan penertiban dan pengawasan serta peningkatan produktivitas penekanan biaya

produksi. Dalam usaha-usaha perbaikan itu, sudah barang tentu perlu selalu dijaga kelestarian sumber alam, diantaranya dengan mempertahankan dan meningkatkan fungsi hidro-orologis tanah sehingga usaha peningkatan produksi perkebunan dan kelestarian lingkungan tetap dapat dipertahankan berjalan sejajar.

### **C. Kesejahteraan Masyarakat**

#### **1. Masyarakat**

Masyarakat menurut Koentjaraningrat (2009 , hlm. 118) adalah “kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu identitas bersama”.

Masyarakat menurut Ralph Linton (dalam Soekanto, 2007, hlm. 22) masyarakat merupakan “setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”.

Masyarakat menurut Soemardjan (dalam Soekanto 2007, hlm. 22) adalah “orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang bertempat tinggal disuatu daerah tertentu dan memiliki aturan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu buruh sadap karet.

#### **2. Kesejahteraan**

Menurut Adi (2013, hlm. 23) kesejahteraan sosial adalah suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi “kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek atau lebih penting dari yang lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud antara aspek sosial, material dan spiritual”.

Midgley (dalam Adi 2013 , hlm. 23) melihat kesejahteraan sosial sebagai “suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan”.

Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (dalam Rinawati 2011 , hlm. 9) menjelaskan pengertian sejahtera yaitu “suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman”.

Pengertian keluarga sejahtera dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah

Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Tujuan dari pembangunan keluarga sejahtera adalah untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat tumbuh rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Sedangkan kesejahteraan menurut Rambe (dalam Sunarti, 2004, hlm. 13) adalah Sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar suatu masyarakat, kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya.

### **3. Indikator Kesejahteraan**

Pengukuran tingkat kesejahteraan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi perkebunan karet terhadap tingkat ekonomi buruh sadap karet.

Kanah, 2014

*TINGKAT KESEJAHTERAAN BURUH SADAP KARET PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII WANGUNREJA DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tingkatan kemakmuran buruh sadap tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan.

Kesejahteraan dapat diukur dengan beberapa indikator, seperti yang dijelaskan BKKBN (1996) pedoman yang dapat digunakan untuk mengukur tahap keluarga sejahtera ada 23 indikator. Dalam pendataan ini keluarga Indonesia digolongkan untuk keperluan operasional ke dalam lima kelompok sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga ini belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Indikator yang dipergunakan adalah kalau keluarga tersebut tidak dapat atau belum dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I.
- b. Keluarga Sejahtera Tahap I, bila mampu memenuhi empat indikator kebutuhan hidup minimal pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
  - 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah.
  - 2) Umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
  - 3) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda untuk di rumah, bersekolah, bekerja dan bepergian.
  - 4) Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
  - 5) Bila anak sakit dibawa ke sarana atau petugas kesehatan serta diberi obat cara modern.
- c. Keluarga Sejahtera Tahap II, yaitu keluarga itu selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, dapat pula memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Indikator yang dipakai adalah empat indikator yang pertama (1) sampai (5) dan keluarga tersebut harus memenuhi syarat-syarat (6) sampai (14) sebagai berikut:
  - 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing.
  - 2) Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
  - 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru satu tahun terakhir.
  - 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk setiap penghuni rumah.
  - 5) Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan tugas/fungsi masing-masing.
  - 6) Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
  - 7) Seluruh anggota keluarga berumur 10-60 tahun bisa baca tulis latin.
  - 8) Seluruh anak berusia 6-12 tahun bersekolah saat ini.
  - 9) Bila anak hidup dua atau lebih keluarga yang masih PUS saat ini memakai atau alat kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

Kanah, 2014

**TINGKAT KESEJAHTERAAN BURUH SADAP KARET PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII WANGUNREJA DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG**  
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- d. Keluarga Sejahtera Tahap III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologis kebutuhan pengembangannya, tetapi belum aktif dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan desa atau wilayahnya. Keluarga harus mampu memenuhi syarat-syarat (1) sampai (14) dan memenuhi syarat-syarat di bawah ini:
- 1) Upaya untuk keluarga meningkatkan pengetahuan agama.
  - 2) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
  - 3) Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk komunikasi antar anggota keluarga.
  - 4) Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
  - 5) Keluarga mengadakan rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan.
  - 6) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/TV/majalah.
  - 7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
- e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan pengembangan dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif pula mengikuti kegiatan semacam itu. Keluarga tersebut memenuhi syarat-syarat (1) sampai (21) dan juga syarat-syarat di bawah ini:
- 1) Keluarga atau anggota keluarga secara teratur (pada waktu tertentu) dan suka rela memberi sumbangan kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk material.
  - 2) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus yayasan/instansi masyarakat .

Berbeda dengan BKKBN, untuk mengukur kesejahteraan Badan Pusat Statistik (2005) menggunakan 8 indikator yang meliputi pendapatan, pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan menyekolahkan anak, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Deskripsi mengenai indikator kesejahteraan tentu harus diperoleh dengan melihat masing-masing indikator secara lengkap.

#### a. Pendapatan

Pendapatan merupakan perolehan barang atau jasa yang diterima seseorang. Menurut Adisasmita (2013, hlm. 97) “pendapatan mencerminkan standar hidup riil masyarakat. Standar hidup riil masyarakat menunjukkan tingkat

kesejahteraan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan merupakan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat”.

#### b. Pengeluaran

Menurut (Sukirno, 2004) “Pengeluaran/konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya. Pendapatan yang diterima suatu rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, membiayai jasa angkutan, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan”. Barang-barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Sunarti (2006, hlm. 15) “Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat apabila terjadi peningkatan riil dari pengeluaran per kapita yaitu peningkatan nominal pengeluaran lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama”.

#### c. Keadaan Tempat Tinggal

Tempat tinggal atau Rumah merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi manusia. Dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak pernah lepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat dimana dia tinggal dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini merupakan fenomena yang sangat logis karena rumah pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluarga untuk menjalankan aktivitas kehidupannya. Menurut Yudhohusodo.

Pada perkembangannya, kebutuhan akan rumah dijadikan salah satu motivasi untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik, dimana rumah yang fungsi utamanya sebagai tempat tinggal bagi penghuninya, juga dijadikan tolak ukur keberadaan status sosial penghuninya baik tingkat kemampuan ekonomi maupun kesejahteraannya.

#### d. Fasilitas Tempat Tinggal

Fasilitas tempat tinggal merupakan sarana untuk melaksanakan segala aktivitas. Fasilitas tersebut terdiri dari ruang serta fasilitas lain yang mendukung segala aktivitas keluarga di rumah. Seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri PU No.54 (1991) “kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya”.



e. Kesehatan Anggota Keluarga

Kesehatan merupakan aspek penting yang harus terus dijaga oleh setiap manusia agar tetap produktif. Seperti yang di jelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 (2009) Tentang Kesehatan, “ Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

#### f. Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 (2013) tentang jaminan kesehatan yang menjelaskan bahwa “Pelayanan kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat”. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional membagi pelayanan kesehatan ke dalam beberapa jenis seperti berikut:

- 1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- 2) Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
- 3) Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.

#### g. Kemudahan Menyekolahkan Anak

Sekolah menjadi kebutuhan mendasar bagi semua orang, apalagi di zaman yang semakin mengedepankan pendidikan sebagai salah satu tolak ukur dan penilaiannya. Seperti yang dijelaskan oleh Mulyadi (2003, hlm. 39) bahwa “pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia yang selanjutnya akan mendorong peningkatan *output* yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan”. Pendidikan memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja.

#### h. Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi.

Kemudahan diartikan sebagai tersedianya fasilitas pelayanan (ekonomi dan sosial) sehingga masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Seperti yang dijelaskan Adisasmita (2013, hlm. 37) “Tersedianya fasilitas mampu memberikan pelayan pemenuhan berbagai kebutuhan kepada masyarakat, berarti

masyarakat merasa berkecukupan atau berkesejahteraan karena berbagai kebutuhan, keinginan dan kepentingan hidupnya dapat terpenuhi dengan cukup, mudah dan lancar”.

Menurut Campbell (dalam Sunarti, 2006, hlm. 15) “Pengukuran dalam kesejahteraan sering menggunakan pembagian kesejahteraan ke dalam dua bagian yaitu kesejahteraan subjektif dan objektif”. Kesejahteraan secara objektif dan subjektif dapat dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individu perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Demikian halnya dengan kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif diantaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tunawisma.

Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, perawatan kesehatan dan pendidikan). Faktor utama dari tingkat kesejahteraan ekonomi adalah daya beli, apabila daya beli menurun maka berdampak pada menurunnya kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehingga tingkat kesejahteraan menurun.

#### **D. Studi Geografi Aspek Pertanian**

Studi geografi hakekatnya adalah suatu pengkajian keruangan gejala dan masalah kehidupan manusia di suatu wilayah. Seperti yang di jelaskan Sumaatmadja (1998, hlm. 247) Studi ini disusun berdasarkan hasil observasi berbagai gejala di lapangan. Studi geografi merupakan suatu penelaahan dan pengkajian gejala kehidupan yang nyata karena studi geografi merupakan

pengkajian keruangan gejala dan masalah kehidupan manusia, sudah pasti ruang lingkungannya sangat luas. Dari ruang lingkup yang demikian luasnya itu, dapat diarahkan kepada tiga pokok utama, yaitu (1) penyebaran dan relasi umat manusia di permukaan bumi, dan aspek keruangan permukiman serta penggunaan permukaan bumi, (2) interelasi masyarakat manusia dengan lingkungan alam yang merupakan studi differensiasi areal, dan (3) kerangka regional dan analisa region-region yang spesifik. Berdasarkan ketiga pokok ruang lingkungannya itu, segala aspek kehidupan manusia dapat terungkap.

Sumaatmaja (1988, hlm. 83) memandang dan menelaah pendekatan ekologi bahwa “pendekatan ekologi diarahkan kepada hubungan antara manusia sebagai makhluk hidup dengan lingkungan alam, pandangan dan penelaahan ini dapat mengungkapkan masalah hubungan penyebaran dan aktivitas manusia dengan lingkungan alamnya”.

Pertanian merupakan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang bisa menghasilkan dan dapat di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Seperti yang dijelaskan Sumaatmadja (1998, hlm. 166) “Pertanian merupakan dasar kehidupan ekonomi manusia. Sampai saat ini dan barangkali sampai beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun mendatang, pertanian masih akan tetap menjadi sumber daya bahan makanan penduduk”. Sebelum manusia dapat mengembangkan sektor kehidupan ekonomi yang lain, pertanian inilah yang menjamin kehidupannya. Selain menjadi sumber daya bahan makanan utama, pertanian juga menyumbangkan potensi lain, baik sebagai bahan perdagangan maupun sebagai bahan dasar industri.

Berdasarkan tinjauan studi geografi, pertanian sebagai suatu sistem keruangan, merupakan perpaduan subsistem fisis dengan subsistem manusia. Ke dalam subsistem fisis termasuk komponen-komponen tanah, iklim, hidrografi, topografi dengan segala proses alamiahnya, sedangkan ke dalam subsistem manusia termasuk tenaga kerja, kemampuan teknologi, tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, kemampuan ekonomi dan kondisi politik setempat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian tingkat kesejahteraan buruh sadap karet PTPN VIII Wangunreja di Kecamatan Dawuan menggunakan pendekatan keruangan. Sumaatmaja (1988, hlm. 78) menjelaskan bahwa “Pendekatan keruangan merupakan salah satu dari metode pendekatan dalam geografi, dalam setiap pendekatan harus berdasarkan prinsip-prinsip geografi yang berlaku. Prinsip-prinsip itu adalah prinsip penyebaran, interelasi, dan deskripsi”. Kesejahteraan merupakan hasil dari aktivitas manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Aktivitas sebagian penduduk di wilayah Kecamatan Dawuan bermata pencarian sebagai buruh sadap karet di perkebunan PTPN VIII Wangunreja yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Dawuan, perbedaan aktivitas dikarenakan wilayah tersebut memiliki iklim dan topografi yang cocok untuk tanaman karet sehingga sebagian penggunaan lahan di Kecamatan Dawuan merupakan area perkebunan.